

**STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI
RENCANA PERALIHAN SISTEM PENGELOLAAN PARKIR
DARI SWAKELOLA KE PIHAK KETIGA**

OLEH : ICHE AGUSTIYANA PUTRI
NIM : 24222240



**KONDISI PENGELOLAAN PARKIR
TEPI JALAN UMUM SAAT INI**

Sistem Swakelola

Target PAD tidak tercapai

Rasio jumlah SDM pengawas
dengan juru parkir tidak
seimbang

**DATA REALISASI
PARKIR TEPI JALAN UMUM
5 TAHUN TERAKHIR**



FAKTOR PENGHAMBAT

- Keterbatasan SDM pengawas parkir tepi jalan umum
- Regulasi yang kaku
- Koordinasi yang kurang dengan stakeholder terkait

**STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN
DALAM PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**



**PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN**

- ✓ DINAS PERHUBUNGAN
- ✓ KEPOLISIAN
- ✓ PENYEDIA / PIHAK KETIGA
- ✓ JURU PARKIR
- ✓ MASYARAKAT



**PEMILIHAN PENYEDIA PIHAK KETIGA
PENGELOLA PARKIR TEPI JALAN UMUM**

- ✓ SURVEY POTENSI PARKIR TEPI JALAN UMUM
- ✓ PROSES PEMILIHAN PEYEDIA
- ✓ PELAKSANAAN KONTRAK KERJA DENGAN PIHAK KETIGA

**TERCAPAINYA PENDAPATAN ASLI
DAERAH RETRIBUSI PARKIR TEPI
JALAN UMUM**



Strategi Dinas Perhubungan Kota Madiun Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Rencana Peralihan Sistem Pengelolaan Parkir Dari Swakelola Ke Pihak Ketiga

Pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Madiun pada tahun 2025 menggunakan sistem swakelola. Jumlah lokasi parkir tepi jalan umum di Kota Madiun sebanyak 55 ruas jalan yang terdiri 235 titik parker, 365 juru parkir dan 8 orang personil dinas perhubungan sebagai pengawas lapangan. Capaian realisasi PAD parkir tepi jalan umum tahun 2024 adalah 75,04 %.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dishub dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum dengan metode swakelola adalah :

- a. Keterbatasan SDM Pengawas.
- b. Regulasi yang Kaku
- c. Koordinasi yang kurang antar stakeholder

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai berikut :

Pemilihan penyedia pengelola parkir tepi jalan umum merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui parkir tepi jalan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan pengelola parkir tepi jalan umum harus melalui beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu :

- a. Survey potensi parkir tepi jalan umum
- b. Proses pemilihan penyedia pengelola parkir tepi jalan umum
Tahapan lelang Prakualifikasi dan Kualifikasi
- c. Kontrak kerja sama dengan pihak ketiga selama 2 tahun
- d. Pengawasan antar stakeholder :
 - Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai regulator utama
 - Pihak Kepolisian sebagai penegak hukum
 - Pihak Ketiga (Pengelola/Vendor)
 - Juru Parkir (Jukir)
 - Masyarakat (Pengguna Jasa)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irawan. (2017). Collaborative governance dalam pelayanan publik: Studi kasus implementasi kebijakan daerah. *Universitas Islam Riau*.
- Kadiono. (2010). *Manajemen parkir perkotaan*. Bandung: ITB.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen keuangan daerah*. Erlangga.
- Saragih. (2003). *Manajemen pendapatan daerah*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Tamin, O. (2008). *Perencanaan dan pemodelan transportasi (Edisi ke-2)*. Bandung: ITB Press.
- Warpani, I. (2002). *Perencanaan transportasi*. Bandung: ITB.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Ansell, & Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Ansell, & Gash. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- Bingham, B. (2010). Building The Legal Infrastructure For Collaborative Governance. *Journal UNLV School of Law*.
- Emerson, Nabatchi, & Balogh. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Emerson, Nabatchi, & Balogh, S. . (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Irawan. (2017). Collaborative governance dalam pelayanan publik: Studi kasus implementasi kebijakan daerah. *Universitas Islam Riau*.